

IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT PEMBINAAN DAN LATIHAN PELAJAR PADA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI SUMATERA SELATAN

THE IMPLEMENTATION OF THE STUDENT COACHING AND TRAINING CENTER PROGRAM ON THE WEIGHTLIFTING SPORT OF SOUTH SUMATERA

Muhammad Lindhu Sapta Perkasa¹, Lili Erina², Nurmah Semil³

¹Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
E-mail: lindhusaptha07@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Pada cabang olahraga angkat besi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sumberdaya manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, belum maksimalnya anggaran dan belum adanya peraturan setingkat daerah yang mengatur tentang program PPLP. Teori yang digunakan oleh peneliti ialah teori pemandu yang dikemukakan oleh George. C Edward III, dimana keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan berupa jenis kualitatif. Proses pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan suatu Implementasi Program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Pada cabang olahraga angkat besi Sumatera Selatan. Dalam implementasi program, terdapat kekurangan pada aspek sumberdaya khususnya sub aspek staf dan fasilitas, dimana jumlah staf belum memadai. Kemudian, sub aspek fasilitas masih belum maksimalnya fasilitas pada atlet. Pada aspek struktur birokrasi belum adanya peraturan tingkat daerah tentang program PPLP. Hasil penelitian menyarankan agar pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dapat memaksimalkan fasilitas atlet angkat besi, terutama fasilitas alat latihan. Serta, diharapkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan memiliki peraturan tingkat daerah dalam pelaksanaan program PPLP.

Kata Kunci: Implementasi, Program, PPLP.

Abstract: The aim of this study is to examine the implementation of the Student Coaching and Training Center Program on the Weightlifting Sport of South Sumatra. This research is motivated by the lack of human resources at the Youth and Sports Office of South Sumatra Province, the budget allocation that is not maximized yet, and the absence of regional-level regulations governing the PPLP (Student Coaching and Training Center) program. The theory used in this study is the implementation theory proposed by George C. Edward III, which suggests that the success of public policy implementation is influenced by four factors, namely: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study employs a qualitative research method. Data collection was carried out through structured interviews, observation, and documentation. The findings of this study indicate the implementation of the Student Coaching and Training Center Program on the Weightlifting Sport of South Sumatra. In the implementation of the program, there are shortcomings in the resource aspect, particularly in the sub-aspects of staffs and facilities. The number of staff is insufficient, and the facilities for athletes are still inadequate. In terms of bureaucratic structure, there is no regional-level regulation on the PPLP program. The study recommends that the Youth and Sports Office of South Sumatra Province should optimize the facilities for weightlifting athletes, especially training equipment. Additionally, it is recommended that the Youth and Sports Office of South Sumatra Province establish regional regulations for the implementation of the PPLP program.

Keyword: Implementation, Program, PPLP.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan dalam menerapkan apa yang sebelumnya sudah ditetapkan. Secara harfiah, implementasi kebijakan ditujukan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan.

Mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dengan dua pilihan, yakni melalui program-program dan melalui implementasi kebijakan turunan dari suatu kebijakan publik (Younistalb, 2015).

Nugroho (Nugroho, 2018) mendefinisikan implementasi kebijakan

pada prinsip atau dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua pihak yang berperan yaitu formulator dan implementor. Formulator memiliki legitimasi untuk membuat sebuah kebijakan yang dimana mengartikan bahwa formulator memiliki peran yang lebih besar dari implementor. Sedangkan peran dari implementor sendiri, ialah menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan sebelumnya.

Program dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana secara sistematis untuk diimplementasikan secara berkelanjutan dalam sebuah organisasi serta melibatkan banyak orang didalamnya (Munthe, 2015). Kebijakan adalah kerangka kerja umum dari serangkaian program yang dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Olahraga merupakan kegiatan jasmani yang bertujuan memelihara kesehatan dan memperkuat otot – otot tubuh. Kegiatan berolahraga ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Setiap negara berlomba-lomba dalam pencapaian prestasi olahraga, baik tingkat nasional ataupun internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga berfokus pada pengembangan prestasi olahraga.

Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa guna meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan, diperlukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dengan jangka waktu yang panjang secara terintegrasi dan kolaboratif. Untuk merealisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Peraturan Presiden RI, 2021). Didalam Perpres ini, menjelaskan tentang

mekanisme dari Desain Besar Olahraga Nasional atau yang disingkat dengan DBON. Desain besar olahraga nasional meliputi olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan industri olahraga. Penyelenggaraan DBON dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Adanya Peraturan Presiden yang mengatur tentang DBON, mengharuskan setiap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang ada didalam DBON. Cabang-cabang olahraga yang tercantum didalam DBON antara lain bulutangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, renang, atletik, senam artistik, pencak silat, dan dayung.

Pemerintah Indonesia memiliki harapan bahwa setiap atlet akan selalu memiliki pengganti atau regenerasi dan tidak kosong dalam posisinya. Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah guna mendukung pengembangan prestasi atlet pelajar memberikan pembinaan kelas olahraga, pusat pembinaan dan latihan pelajar (PPLP) dan sekolah khusus olahraga (SKO) yang dimana telah tercantum didalam Permenpora RI Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Di Daerah. Adanya peraturan tersebut bertujuan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengembangan prestasi atlet.

Angkat besi merupakan salah satu cabang olahraga yang termuat didalam desain besar olahraga nasional (DBON). Olahraga angkat besi mengutamakan kekuatan otot, keterampilan, fleksibilitas, konsentrasi, disiplin dan mental atlet. Cabang olahraga angkat besi juga merupakan cabang olahraga andalan bagi Negara Republik Indonesia. Cabang olahraga angkat besi banyak menorehkan prestasi baik tingkat Nasional ataupun Internasional. Harapan pemerintah

Indonesia tentunya ingin prestasi tersebut tetap ada dan tidak terputus antar generasi.

Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dispora Provinsi turut menjalankan program dari Permenpora Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Di Daerah (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, 2022). Salah satunya program pusat pembinaan dan latihan pelajar (PPLP). Program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) merupakan salah satu tempat pembibitan dan pembinaan anak usia dini yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi Indonesia (Putra et al., 2018). Program pusat pembinaan dan latihan pelajar merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah ada sejak Tahun 2013. Untuk anggaran pelaksanaannya bersumber dari APBN. Program pusat pembinaan dan latihan pelajar termasuk didalam DBON yakni pada bagian olahraga prestasi.

Program pusat pembinaan dan latihan pelajar merupakan salah satu kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel dalam melakukan pembinaan dan pelatihan atlet yang berbakat dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi tingkatan Nasional ataupun Internasional. Cabang olahraga angkat besi merupakan salah satu cabang yang ada dibawah program pemusatan pembinaan dan latihan pelajar (PPLP) Provinsi Sumsel yang berdasarkan pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Cabang olahraga angkat besi dapat menjadi bagian program PPLP dikarenakan dua hal, yang pertama mengikuti desain besar olahraga nasional yang mencantumkan olahraga prioritas. Kemudian yang kedua ialah karena terjadinya sistem terdegradasi atau dikenal dengan sistem penurunan.

Harapan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap hadirnya cabang olahraga angkat besi pada PPLP tentunya ingin atlet-atlet muda khususnya pelajar yang memiliki bakat dalam bidang cabor

angkat besi dapat mengukir prestasi untuk Negara, Provinsi, Daerah. Tidak hanya sampai disitu, Dispora Provinsi Sumatera Selatan juga mengharapkan pelajar Provinsi Sumatera Selatan dapat mewakili Negara untuk berkompetisi pada kejuaraan internasional.

Cabang olahraga angkat besi mulai bergabung dengan PPLP pada Tahun 2022. Dispora Provinsi Sumatera Selatan memiliki target awal pada PPLP cabor angkat besi. Target awal tersebut, mulai dari adanya atlet yang mampu bersaing ditingkat nasional, fasilitas latihan, dan pelatih cabor angkat besi.

Tabel 1. Target dan Pencapaian program pemusatan pembinaan dan latihan pelajar (PPLP) cabor angkat besi pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Target	Pencapaian	Keterangan
1	Memiliki sumber daya manusia (Atlet cabang olahraga angkat besi)	Terdapat Enam orang atlet angkat besi	Memenuhi
2	Memiliki fasilitas latihan atlet	Belum memiliki fasilitas yang memadai	Belum Memenuhi
3	Memiliki pelatih cabang olahraga angkat besi	Terdapat Satu orang pelatih cabor angkat besi	Memenuhi

Sumber. Diolah penulis berdasarkan Laporan Kegiatan PPLP Dispora Prov Sumatera Selatan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, PPLP cabor angkat besi pada Tahun 2022 memiliki enam orang atlet. Adapun keenam atlet yang bergabung pada PPLP

Prov Sumsel ialah atlet yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasi. Dispora Provinsi Sumsel merekrut atlet asal Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan atlet-atlet tersebut telah memiliki pengalaman dan capaian prestasi yang tinggi. Keenam atlet ini, telah bergabung pada Persatuan Angkat Besi Seluruh Indoensia (PABSI) cabang Kabupaten Banyuasin sejak Tahun 2016. Oleh sebab itu, Dispora Provinsi menilai bahwa untuk pembentukan atlet sendiri tidak akan memakan waktu lama dikarenakan para atlet telah memiliki pengalaman dan capaian prestasi.

Kemudian untuk fasilitas, Dispora Provinsi Sumatera Selatan mengaku bahwa belum memiliki tempat atau fasilitas latihan yang memadai. Belum adanya sarana fasilitas latihan menyebabkan latihan atlet tetap di Kabupaten Musi Banyuasin dan bukan di Kota Palembang. Pada pelatih PPLP cabang olahraga angkat besi juga berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin yang dimana pelatih tersebut merupakan pelath atlet-atlet cabor yang telah direkrut sedari pengasuhan atlet di PABSI.

Dalam penyelenggaraan program PPLP, dari segi komunikasi antara Dispora Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak terkait seperti Pengurus Provinsi Persatuan Angkat Besi Indonesia cabang Sumatera Selatan, Pelatih cabor angkat besi, dan para atlet cabor angkat besi telah dilakukan melalui surat menyurat dan via pesan elektronik. Adapun komunikasi yang dilakukan seperti pemberitahuan seleksi atlet maupun pelatih, pemberitahuan event kejuaraan, pemberitahuan honorarium, dan pemberitahuan informasi mengenai kemajuan atlet.

Dari segi disposisi, adapun pembentukan tim atau kepanitiaan dalam menjalankan program PPLP pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan tim bertujuan agar penyelenggaraan program PPLP dan terorganisir dengan baik. Kemudian, terdapat juga insentif

pada pelatih dan atlet cabor angkat besi yang diberikan oleh Dispora Provinsi Sumatera Selatan.

Akan tetapi pada pelaksanaan PPLP, belum memiliki peraturan yang mengatur tata pelaksanaan pada tingkat provinsi seperti Peraturan Gubernur, atau Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Atas dasar uraian latar belakang penelitian, penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi program pusat pembinaan dan latihan pelajar pada cabang olahraga angkat besi Sumatera Selatan.

METODOLOGI

Lokasi penelitian yang diteliti yaitu Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya penelitian ini dilihat dari fenomena-fenomena yang ada dan bukan berdasarkan perhitungan statistiska (angka) melainkan bersumber dari wawancara, dokumentasi, dokumen pribadi dan dokumen lainnya (Creswell, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling untuk menentukan informan dengan cara memilih informan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2017). Untuk Mendapatkan data yang akan diolah, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, teori yang dipakai dalam menganalisis kebijakan program pusat pembinaan dan latihan pelajar cabang olahraga angkat besi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah teori dari Edward III (Edward III, 1980). Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kritis, yaitu komunikasi yang memiliki sub aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi. Kemudian sumberdaya yang memiliki sub aspek stafn kewenangan, informasi, dan fasilitas. Disposisi dengan sub aspek pengangkatan birokrasi dan insnetif, serta struktur birokrasi yang memiliki sub aspek SOP dan fragmentasi.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses ketika seseorang, beberapa orang atau bahkan sekelompok orang menggunakan informasi untuk saling terhubung. Komunikasi pada implementasi kebijakan publik diyakini sebagai unsur yang penting. Tanpa adanya komunikasi, maka implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan lancar. Keberhasilan komunikasi pada implementasi kebijakan publik dari model Edward III diukur dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi

Pada aspek transmisi atau penyaluran kebijakan, telah terdapat surat pemilihan pelatih dan atlet sebagai media penyalur kebijakan yang diberikan Dispora kepada pihak Pengprov. Pada penyaluran program PPLP tersebut, tidak hanya Dispora yang mengetahuinya melainkan pihak-pihak yang berkepentingan juga mengetahui isi dari adanya program PPLP.

b. Kejelasan

Pada aspek kejelasan isi kebijakan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel telah menjelaskan isi kebijakan. Penjelasan dari pihak Dispora kepada para pelatih dan atlet dapat membuat mereka langsung memahami isi

kebijakan atau tujuan dari program PPLP tersebut.

c. Konsistensi

Pihak Dispora Provinsi Sumatera Selatan menjunjung tinggi sikap profesionalisme selama menjalankan program. Sikap Profesionalisme yang ditunjukkan oleh pihak Dispora Provinsi Sumatera Selatan yakni konsisten dalam menjalankan tugas yang dimana pihak Dispora Provinsi melaksanakan hal-hal yang tercantum didalam SK penunjukan pelatih dan atlet cabor.

2) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi. Sumberdaya dapat berupa fisik, tetapi dapat juga berupa non-fisik. Untuk mengukur keberhasilan aspek sumberdaya, terdapat empat sub aspek yang menjadi indikator keberhasilan aspek sumberdaya yaitu staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

a. Staf

Terdapat kekurangan pada jumlah staf yang bertugas pada saat menjalankan program pemusatan pembinaan dan latihan pelajar Sumatera Selatan. Adanya kendala ini disebabkan oleh tenaga teknis yang bertugas hanya berjumlah empat orang. Sehingga, mereka kerap mengalami kendala.

b. Kewenangan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan menjalankan program PPLP sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Permenpora Nomor 10 Tahun 2022. Amanat Permenpora yang dijalankan oleh Dispora Provinsi Sumatera Selatan juga yang menjadi kewenangan pihak Dispora dalam menjalankan program PPLP.

c. Informasi

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Dispora Provinsi Sumatera Selatan melalui surat-menyurat, via panggilan telepon selular, via chat Whats-app, dan melalui akun media sosial Instagram.

d. Fasilitas

Sarana dan prasarana dari sisi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan masih layak dan terawat. Tetapi, dari sisi sarana untuk atlet belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari adanya alat-alat yang diusulkan oleh pelatih PPLP cabor angkat besi tidak direalisasikan oleh pihak Dispora Provinsi Sumatera Selatan.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sudut pandang administrasi yang mengartikan suatu urusan termuat didalam surat yang dituliskan pada surat bersangkutan atau lembaran khusus. Pada aspek disposisi (Edward III, 1980) mengatakan bahwasannya disposisi ialah sikap dari implementor dalam menjalankan kebijakan. Sikap yang dimaksud oleh Edward III ialah hal yang mendorong keinginan dari implementor tersebut untuk melaksanakan kebijakan. Dalam aspek disposisi, terdapat dua sub aspek yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.

a. Pengangkatan Birokrasi

Untuk pengangkatan secara formal sebagai ketua pelaksana tim pengelola PPLP pada Dinas pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Selatan itu tidak dilakukan. Adapun pengangkatan yang dilakukan pada lingkungan Dispora Provinsi Sumatera Selatan ialah pengangkatan jabatan struktural yang nantinya akan mengisi posisi-posisi pada tim kepanitiaan program atau kebijakan.

b. Insentif

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah membuktikan adanya pemberian insentif pada program PPLP. Pemberian insentif kepada anggota tim pengelolaan program PPLP memberikan efek kepada setiap anggota agar dapat bekerja dengan maksimal. Kemudian, adanya gaji atau insentif pada atlet dan pelatih PPLP cabor angkat besi membuat mereka untuk dapat berlatih lebih giat dan berinisiatif

memiliki tanggung jawab untuk dapat menyumbangkan prestasi pada PPLP Sumatera Selatan cabor angkat besi. penerimanya.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah cara bagaimana suatu pekerjaan dibagi atau dikoordinasikan secara formal dengan pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Struktur birokrasi memiliki dua sub aspek yang menjadi tolak ukur keberhasilannya, yaitu Standard Operational Procedure (SOP) dan Fragmentasi yang dilihat dari koordinasi.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP yang digunakan oleh Dispora Provinsi Sumatera Selatan ialah SK tim pengelolaan program PPLP yang dimana SK tersebut sebagai pedoman agar pelaksanaan program terarah serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pelaksanaan program ini belum berpedoman pada Peraturan kepala daerah atau peraturan tingkat daerah.

b. Fragmentasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Pengurus Provinsi Angkat Besi Sumatera Selatan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelimpahan wewenang untuk rekrutmen atlet dan pelatih cabor angkat besi pada pihak Pengurus Provinsi Angkat Besi Sumatera Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait analisis Implementasi program pemusatan pembinaan dan latihan pelajar pada cabor angkat besi Sumatera Selatan yang dipandu oleh teori Edward III yang memiliki empat aspek yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi yang ditinjau dari ketiga sub aspek yakni, transmisi, kejelasan, dan konsistensi tidak mengalami kendala dan telah terlaksana dengan efektif. Namun pada sub aspek

transmisi atau penyaluran kebijakan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan masih menggunakan surat sebagai media penyalur kebijakan dan belum menggunakan sarana teknologi seperti E-mail atau Whats-app. Penyaluran kebijakan menggunakan surat tidak efisien dari segi waktu yang dimana memerlukan langkah-langkah dan surat balasan, baik dari komunikator maupun komunikan sehingga transmisi yang dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Kemudian Pada aspek sumberdaya belum efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan adanya sub aspek yang belum optimal, yakni sub aspek staf yang mengalami kendala pada jumlah dan sub aspek fasilitas yang belum memadainya fasilitas atlet. Pada aspek disposisi sudah efektif. Aspek disposisi dikatakan telah efektif dikarenakan tidak mendapati kekurangan atau kendala pada kedua sub aspek yang telah terlaksana dengan optimal. Dan yang terakhir pada aspek struktur birokrasi belum efektif. Belum efektifnya struktur birokrasi dikarenakan masih memiliki kekurangan yang ditunjukkan pada sub aspek SOP yang dimana belum adanya peraturan tingkat daerah mengenai pengelolaan PPLP. Belum adanya peraturan tingkat daerah seolah program PPLP tersebut belum menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Dari kesimpulan keempat aspek diatas, dapat dikatakan bahwa Implementasi program pemusatan pembinaan dan latihan pelajar pada cabang angkat besi Sumatera Selatan belum efektif. Hal ini dikarenakan terdapat kedua aspek yang belum efektif yakni aspek sumberdaya dan struktur birokrasi. Ketidakefektifan pada kedua aspek tersebut bertentangan dengan apa yang (Edward III, 1980) nyatakan. Edward (1980) menyatakan keberhasilan

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kritis, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta kebijakan tidak akan berhasil tanpa implementasi yang efektif dari pembuat kebijakan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. In *CQ Press*. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-86>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. *Scholaria*, 5(2), 1–14.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy (Edisi 6)*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga. (2022). *Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah*.
- Peraturan Presiden RI. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional*.
- Putra, A., Yarmani, & Arwin. (2018). Implementasi Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Dalam Menunjang Prestasi Olahraga Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani*, 2(2), 7–11.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Younistalb. (2015). *Implementation of Public Policy*. Dartmouth.